

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG  
DI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

**MANAJEMEN LOGISTIK OBAT GOLONGAN PSIKOTROPIKA DI INSTALASI  
FARMASI PROVINSI JAWA TIMUR DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA  
TIMUR**



**Oleh:  
ANA MARIATUL ULFA  
NIM. 101611133082**

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG DI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA  
TIMUR**

Disusun Oleh:  
**ANA MARIATUL ULFA**  
**NIM. 101611133082**

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh:

Tanggal 9 Maret 2020

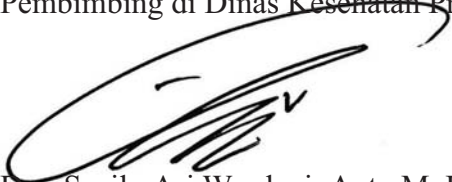
Pembimbing Departemen,



Hham Akhsanu Ridlo, S.KM., M.Kes  
NIP. 198603232015041003

Tanggal 9 Maret 2020

Pembimbing di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur,



Dra. Susilo Ari Wardani, Apt., M. Kes  
NIP. 197002081996032002

Tanggal 9 Maret 2020

Mengetahui

Ketua Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan,



Dr. Setya Haksama, drg., M.Kes  
NIP. 196509141996011001

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Jawa Timur yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta Sumber Daya Manusia Kesehatan.
2. Perencanaan obat yang dilakukan oleh Instalasi Farmasi Provinsi Jawa Timur berupa pengumpulan RKO (Rencana Kebutuhan Obat) yang diminta dari bagian program. Pembuatan RKO dilakukan secara berjenjang mulai dari perencanaan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) untuk program tertentu kemudian dikirimkan kepada Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan selanjutnya akan direkapitulasi oleh Instalasi Farmasi Provinsi Jawa Timur yang pada akhirnya akan diajukan sebagai perencanaan kebutuhan obat untuk tahun selanjutnya.
3. Proses penerimaan dan pemeriksaan obat di Instalasi Farmasi Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan ketentuan di mana setiap melakukan penerimaan dan pemeriksaan memperhatikan *critical point* yaitu kesesuaian dengan pesanan yang telah dilakukan sebelumnya. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek kesesuaian faktur dengan barang yang diterima.
4. Sebagian besar kegiatan penyimpanan dan pemusnahan yang dilakukan di Instalasi Farmasi Provinsi telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5. Kegiatan distribusi obat di Instalasi Farmasi Provinsi Jawa Timur berupa pengiriman atau distribusi ke kabupaten atau kota yang sebelumnya telah memberikan perencanaan kebutuhan obatnya (RKO). Selain menerima, Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dapat meminta (melakukan pengambilan) obat ke Instalasi Farmasi Provinsi Jawa Timur. Jadi terdapat penggabungan antara teknik pengambilan dan teknik *push* yang dilakukan dalam distribusi obat.

6. Proses pencatatan pengeluaran dan pemasukan obat dilakukan tidak secara manual tetapi sudah terkomputerisasi. Proses ini menggunakan aplikasi Simbada (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah). Hal yang tercatat di Simbada meliputi nama, bentuk sediaan, jumlah, tanggal penerimaan, jumlah penerimaan, nomor batch. Belum terdapat keterangan tanggal kedaluwarsa dari obat dalam pencatatannya.

## 5.2 Saran

Sebagian besar kegiatan pengelolaan obat golongan psikotropika yang dilakukan di Instalasi Farmasi Provinsi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan masukan khususnya terkait proses penyimpanan yaitu:

1. Ruang penyimpanan harus selalu dalam keadaan terkunci dan yang berhak memasuki ruangan hanya pihak yang bertanggungjawab atau pihak lain yang diinginkan. Sebaiknya tidak meninggalkan ruangan penyimpanan dalam keadaan terkunci karena dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan obat.
2. Penyusunan obat sebaiknya memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis agar lebih mudah dalam proses pengambilan obat saat ingin dilakukan distribusi dan mempermudah proses penyimpanan obat.
3. Penyusunan obat juga sebaiknya memperhatikan kemiripan penampilan dan penamaan obat (*LASA, Look Alike Sound Alike*) dengan tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat.